

## TAJUK

## Jangan Sampai Semangat Demokrasi Ternodai

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Masinton Pasaribu menyebut adanya keterlibatan korporasi perusahaan sawit dalam upaya perpanjangan jabatan presiden hingga tiga periode. Selain melawan konsultasi, Masinton menyebut upaya sistematis itu yang membuat kelangkaan minyak goreng di pasaran.

Dukungan pengusaha agar pemilihan presiden (pilpres) ditunda dan jabatan presiden diperpanjang disampaikan salah satunya oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia awal Januari lalu.

Menurut Bahlil, alasan pengusaha meminta agar pilpres ditunda demi menjaga tren pemulihan ekonomi yang sempat terpukul akibat pandemi Covid-19. Pernyataan Bahlil itu belakangan juga sempat mendapat dukungan partai politik di parlemen seperti PKB, PAN, dan Golkar.

Wacana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi tiga periode seperti mengguyurkan minyak ke dalam api. Di saat perekonomian sedang tertatih bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat

dampak pandemi Covid-19, wacana tersebut tak pelak membuat rakyat bergejolak, demonstrasi muncul di mana-mana.

Dalam konteks kebebasan berpendapat mungkin wajar bila ada sebagian kalangan yang mendukung perpanjangan masa jabatan presiden atau presiden tiga periode. Hal ini mungkin karena kekhawatiran ekonomi akan bergejolak atau karena "kenyamanan" yang mereka rasakan selama ini.

Namun di balik itu, mereka tidak menyadari keinginan tersebut menunjukkan masih

rendahnya atau makin terkinisnya nilai-nilai ketataan terhadap konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi di kalangan para elite.

Padahal seperti kita tahu Indonesia selama ini sudah cukup berhasil menanggapi tantangan demokrasi dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hasil gerakan presiden dibatasi dua kali. Kemudian Indonesia berhasil melaksanakan pemilu secara langsung selama empat kali. Semangat untuk menerapkan dan menjunjung tinggi

demokrasi juga terwujud dalam berbagai pemilihan kepala daerah tingkat provinsi hingga tingkat terkecil sekali pun seperti pemilihan RT.

Prosedur demokrasi di Indonesia juga sudah melembaga cukup baik dengan penyelenggaraan pemilu untuk memilih wakil rakyat dan presiden yang digelar secara reguler setiap lima tahun.

Memang tak bisa dimungkiri masalah-masalah dan kendala-kendala masih mewarnai dalam setiap pesta demokrasi di tengah dinamika naturi kompetisi

dalam pemilu. Namun, secara prinsip, kehidupan berdemokrasi di negeri ini sudah berjalan dengan baik dan dalam koridor yang benar. Inilah yang harus kita jaga dengan baik, oleh segenap bangsa. Apalagi kalangan elite yang seharusnya memberikan contoh dan teladan bagi rakyat untuk terus taat dan mematuhi undang-undang demi keberlangsungan kehidupan berdemokrasi. Jangan sampai masalah kecil keinginan segelintir kalangan bisa mengganggu atau menodai semangat demokrasi di negeri ini.

## OPINI

## Vandalisme Keraton Kartasura

Hati kami bergetar. Rasa perih dan muak gagal disembunyi dari raut wajah para hadirin, tanpa diwarnai teriakan takbir. Malam gulita, lagu *Indonesia Pusaka* serentak ditembangkan ratusan orang di kompleks Keraton Kartasura, Jawa Tengah (Sabtu, 23/4). Acara bertajuk *Telesing Luh ing Kartasura* dihelat guna merespons aksi perusakan tembok istana buatan abad XVII itu. *Luh* (air mata) menetes, meratapi benteng keraton berumur 400 tahun ini *ajar murmur* dihantam alat berat tanpa ampun.

Situs kuno di sisi barat kampung halaman Presiden Joko Widodo tersebut kini menjadi buah bibir bukan lantaran jejak penting dinasti Mataram Islam. Melainkan, gara-gara dirusak oleh "perbad tanah" akibat ketidaktaatan terhadap *heritage*. Mengapa sebagian tembok klasik itu bisa masuk dalam seri/fakta si pembela tanah merupakan pertanyaan mengusuk kalbu sampai detik ini. Keadaan tambah runyam selepas diketahui pengelolaan cagar budaya tingkat nasional itu ternyata diserahkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per 1 Januari 2020.

Sportif diakui bahwa aspek sumber daya manusia dan dana perawatan di tingkat kabupaten jelas tak mencukupi dalam program pelestarian tinggalan leluhur segede ini. Alih-alih melaju ke tahap pengembangan warisan sejarah, tahap pencatatan objek yang diduga cagar budaya di level lokal saja masih tertatih-tatih. Sementara, mereka kudu berpacu dengan sang kala, kian hari bangunan tua itu kian merenda dan melapuk dicaplok zaman.

Selama ini, saya rasa terdapat pemahaman keliru dalam makna "ibu kandung" Keraton Kasunanan Surakarta, Keraton Kasultanan Yogyakarta, Pura Mangkunegaran, dan Pura Paku Alaman tersebut. Bekas Istana Kartasura acap dipandang sebagai "zaman kegelapan" dari masa ke masa, seolah tiada setitik sinar di kedaton kuno sepanjang periode itu. Kawasan historis ini menyimpan kisah pahit sedekat pewaris wangsa Mataram Islam berumur konflik. Antara lain, Amangkurat II (1677-1703), Amangkurat III (1703-1704), Paku Buwana I/Pangeran Puger (1704-1719), Amangkurat IV (1719-1727) serta Paku Buwana II (1727-1746). Membaca alur sejarahnya, cagar budaya yang didirikan Amangkurat II itu melulu disorot dalam perspektif konflik, kekerasan, pericatan darah, ambruknya kekuasaan Jawa, hingga



Heri Priyatomo

Dosen Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma

akhirnya maklum dilupakan.

Terbukti taklaka kasus vandalisme mencuat ke permukaan, memori kelam tergugah dari tidur panjangnya. Ingatan kolektif masyarakat sontak mengarah pada peristiwa nahas *bedhah Kartasura* alias *geger pecinan* yang meluluhlantakkan ibu kota kerajaan tahun 1742. Sampai terbit guyonan getir, yaitu dulu tembok dijebol memakai senjata, sekarang dirusak pakai ekskavator, tanpa harus melibatkan campur tangan Kompeni. Bahkan, cerita pilu berabad silam diabadikan lewat mitos "geblag Kartasura" bahwa warga setempat tidak dianjurkan menggelar hajatan bertepatan dengan hari kehancuran Keraton Kartasura, sebab mengandung unsur negatif. Sederhananya, tak pantas robohnya kedaton dan hilangnya kewibawaan raja diperingati dengan pesta pora.

Lalu, sepotong pertanyaan disorotkan, apakah ada pencapaian gemilang atau setitik sinar di era Kartasura untuk diumumkan ke publik? Mari kita mengayunkan kaki ke Museum Radyapustaka, Solo. Nanti bakal dijumpai artefak yang tersisa dari peradaban Kartasura yang relatif pendek itu, yakni berwujud mesin jam. Teknologi yang bertemali dengan unsur waktu itu

sudah karatan, tapi memuat makna tak sepele. Pengujung abad XVII, terjadi perubahan pola pemikiran masyarakat Jawa. Jam raksasa itu menggantikan gejala alam sebagai *refersensi*. Taruhlah contoh, *waktu bocah ngucul sore* (ketika anak menggembalikan ternaknya) dan *strengege wis angsepel* (mentari telah karam) sehingga tiba saatnya menyudahi pekerjaan. Guna memuatkan sembahyang Subuh, barisan bangsawan di istana Kartasura dan ulama di kampung Kauman tak lagi bergantung pada simbol alam embun getol mengerasi rerumputan ataupun kokok ayam terdengar kali pertama. Jam dipasang di ruang terbuka dekat bunian raja ini menyulap kultur tersebut.

Selain sesobek cerita di muka, capaian terbaik lainnya ialah penggabungan karya sastra. *Senat Menak*, *Senat Iskandar*, *Senat Yusuf*, dan *Senat Ngusulbiyara* semula berbahasa Melayu dari daerah Campa digubah atas titah Kanjeng Ratu Mas Balitar Setumpuk naskah diterjemahkan dalam aksara Jawa dan dipelajari barisan aristokrat, lantas dituturulkan (*gotok tular*) ke masyarakat. Belahan hati Paku Buwana I yang juga nenek Paku Buwana II tersebut lincah menciptakan "alat legitimasi" taklaka kekuatan kerajaan

Kartasura melengkap akibat peperangan dan intervensi VOC. Strategi budaya ini tampaknya terinspirasi oleh Sultan Agung yang melahirkan Sastra Gending sewaktu kekuasaannya menipis akibat kalah melawan VOC. Ia berujar, setiap wangsa Mataram harus menguasai sastra dan gending yang sekaligus merupakan sarana dalam ibadah mistik.

Serpihan fakta tersebut menuduhkan tumbuhnya budaya anyar Keraton Kartasura yang cerdas menggarap naskah internasional ke dalam budaya tradisional. Dalam studi sastra Alex Sadewa (1995) dipaparkan, usaha ini memperlihatkan keluasan cakrawala elite Jawa di Kartasura di tengah kemelut. Mereka menjaga keluhuran moral dan religi masyarakatnya, namun memiliki orientasi yang luas ke arah luar kelompok. Artinya, mereka berhasil benjengak dalam arus globalisasi dan modernisasi, tanpa terseret menanggalkan kejawaannya.

Demikianlah, sebagian kelir apik untuk melawan (meluruhkan) stigma negatif "zaman kegelapan" yang kuat ditampalkan pada dinasti Kartasura. Tentu masih ada prestasi lainnya guna membuka kesadaran kita memaknai ulang *heritage* di ujung barat Kota Solo yang nestapa. Mestinya bersemangat merawat dan memopulerkan situs Keraton Kartasura, bukan malah membuatnya *babak bundas*.

Belajar dari bangsa Yunani, beberapa pilar lawas yang tersisa masih dipelihara sebaik mungkin karena mampu menggaungkan narasi sejarah benih demokrasi *brojol* di sana hingga meresap ke penjuru dunia. Jika cagar budaya itu melenyap, bukan tak mungkin di kemudian hari kisah sejarah dianggap isapan jempol alias *koya*.



Tembok bekas Keraton Kartasura yang dijebol di Kampung Krapyak Kulon RT002/RW010, Kelurahan Kartasura, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo.

### ■ NUWUN SEWU

#### ● Bekas Keraton Kartasura menjadi tanggung jawab Pemkab.

– Kita tunggu program penyelamatan oleh Pemkab Sukoharjo.

#### ● Tiga perusahaan telah menerima insentif triliunan rupiah, tetapi masih menambak cuan dengan ekspor ilegal minyak goreng.

– Kalau ini bukan hanya cari cuan, tetapi ehmm, greedy (tamat).

### ■ KAMUS ESPOS

**Vandalisme:** perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lain (keindahan alam dan sebagainya); perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas. Contoh: Vandalisme Keraton Kartasura (Solopos, 25/4/2022, hal. 2). Sumber: KBBI online.

**Kedaton:** kerajaan; singgasana. Contoh: Bekas Istana Kartasura acap dipandang sebagai "zaman kegelapan" dari masa ke masa, seolah tiada setitik sinar di kedaton kuno sepanjang periode itu (Solopos, 25/4/2022, hal. 2). Sumber: KBBI online.